

Analisis Wacana Kritis Dalam Poster Kebijakan Publik di Timor-Leste Pada Konteks Krisis Migas Global: Bahasa sebagai Representasi Kekuasaan dan Strategi Pengaturan Sosial

Gracia Firsti Assis Nunes.¹, Aprillia Firmonasari²

¹Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. ²Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

E-Mail¹: graciafirstiassisnunes@mail.ugm.ac.id

Submission Track:

Received: 10-11-2025, Final Revision: 15-01-2026, Available Online: 01-02-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Analisis wacana kritis terhadap poster kebijakan energi pemerintah Timor Leste dalam konteks krisis migas global menunjukkan bahwa poster tersebut secara efektif menyampaikan pesan publik melalui integrasi struktur makro, superstruktur, dan mikro. Pada tingkat makro, poster membangun narasi krisis energi sebagai kondisi darurat yang memerlukan intervensi negara. Pada tingkat superstruktur, penyusunan informasi dilakukan secara sistematis dengan pola situasi, respons pemerintah, implikasi kebijakan, dan legitimasi otoritas, sehingga membentuk alur argumentatif yang persuasif. Pada tingkat mikro, diksi yang menekankan urgensi, kontrol, dan jaminan, serta strategi semantik seperti implikatur dan presuposisi, mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan sebagai respons yang rasional dan tidak terelakkan. Namun demikian, konstruksi wacana tersebut juga merefleksikan kecenderungan ideologis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara masyarakat direpresentasikan sebagai subjek yang harus menyesuaikan diri, sehingga mencerminkan relasi kuasa yang asimetris dan potensi normalisasi kontrol sosial dalam situasi krisis.

KATA KUNCI: *Analisis Wacana Kritis; Krisis Energi Global; Ideologi dan Kuasa; Struktur Wacana; Legitimasi Kebijakan Publik*

PENDAHULUAN

Konflik geopolitik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah memberikan tekanan yang signifikan terhadap dinamika global dan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan sumber daya energi (Madani & Qomar, 2025; Budi, dkk., 2025). Perang yang

terjadi di berbagai kawasan tersebut telah memicu krisis energi global, yang ditandai oleh terganggunya rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar, serta ketidakpastian distribusi energi di berbagai negara (Ruslin, 2013; Soemantri, 2024) sehingga negara-negara tersebut dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang cepat dan strategis guna menjaga stabilitas nasional sekaligus mengelola respons masyarakat terhadap kondisi krisis (Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 2016; James Anderson dalam Wahab, 2015). Maka dari itu, peran pemerintah tidak terbatas pada pembuat keputusan serta pengambil kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diartikulasikan kepada masyarakat (Agustino, 2008; Suharto, 2008; Meutia, 2017).

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk membangun urgensi, membentuk persepsi publik, serta mengarahkan perilaku masyarakat melalui informasi yang disampaikan agar selaras dengan kebijakan yang diterapkan. Pandangan ini dalam ranah linguistik dapat dipahami melalui perspektif wacana kritis Teun A. Van Dijk (1997, 2008, 2009) yang menempatkan bahasa sebagai bagian dari praktik sosial yang berperan dalam membentuk kognisi masyarakat (Suriadi, 2025; Prihartono & Suharyo, 2022; Putra & Usoni, 2024; Annur, dkk., 2025). Menurut Van Dijk (1997), wacana tidak hanya berfungsi untuk merefleksikan realitas, tetapi juga secara aktif membangun cara berpikir, menyebarkan pengetahuan, serta menanamkan keyakinan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Wacana sebagai praktik sosial tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang melatarbelakanginya. Melalui pilihan kata dalam kalimat tertentu, pemimpin (dalam hal ini pemerintah) mencerminkan dominasi, mengarahkan opini publik, dan mengontrol interpretasi terhadap suatu isu (Damayanti & Nurjanah, 2026).

Salah satu negara yang mengambil kebijakan publik yang berkaitan dengan krisis global dan menyajikannya dalam sebuah wacana adalah Timor Leste. Pemerintah Timor Leste memanfaatkan media poster sebagai salah satu cara menyebarkan kebijakan publik terkait krisis global kepada masyarakat. Agen berita resmi milik negara yang memproduksi wacana kebijakan publik salah *Tatoli*. Secara leksikal, *Tatoli* dalam bahasa Tetun memiliki makna ‘meneruskan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain’, yang mencerminkan

konsep komunikasi sebagai proses penyampaian amanah yang bersifat relasional. Namun demikian, dalam konteks negara, peran *Tatoli* tidak sebatas untuk menyampaikan informasi, melainkan sebagai perantara institusional yang merepresentasikan suara dan otoritas pemerintah dalam ruang publik. Dengan demikian, wacana yang disampaikan media ini tidak bersifat netral, tetapi mengandung dimensi kekuasaan, karena berfungsi untuk membingkai realitas krisis sekaligus mengarahkan respons masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah poster kebijakan publik yang diunggah oleh media *Tatoli* dengan tajuk *Governu Planeia Oinsa Halo Poupansa Hodi Garante Kombustivel Ba Tempu Naruk* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi ‘Pemerintah Merencanakan Cara Melakukan Penghematan untuk Menjamin Ketersediaan Bahan Bakar dalam Jangka Panjang’. Penelitian AWK terhadap poster telah dilakukan dalam beberapa penelitian terdahulu, beberapa diantaranya adalah yang dilakukan oleh Septriana, dkk. (2022) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Iklan Layanan Masyarakat Covid-19 Pada Koran Media Indonesia (Kajian Teun A. Van Dijk), dengan hasil bahwa wacana iklan layanan masyarakat Covid-19 dikonstruksi melalui struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman dan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulhandayani, dkk. (2023) dengan judul “Struktur Wacana pada Iklan Pinjol oleh Kominfo: Teori Van Dijk”, dengan hasil bahwa terdapat struktur wacana yang lengkap pada poster tersebut sehingga memudahkan pembaca untuk memperoleh informasi serta himbauan yang disampaikan dalam poster. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nabila, dkk. (2025) yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Teori A. Van Dijk pada Poster ‘*Jangan Diam Saja, Bergerak Itu Sehat* oleh Kemenkes RI”, dengan hasil bahwa poster yang dikaji merupakan bentuk komunikasi persuasif yang efektif dalam menyampaikan pesan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strukturwacana dalam poster kebijakan publik di Timor-Leste dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis model Van Dijk serta melihat bagaimana bahasa yang digunakan

dapat membangun urgensi, membentuk persepsi publik, dan mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan kebijakan pemerintah di tengah krisis energi global. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada penetapan teori AWK untuk membedah bagaimana pemerintah Timor Leste menggunakan poster di media *Tatoli* sebagai alat kekuasaan untuk menyetir pilihan tindakan rakyat di tengah krisis energi global yang dialami saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan landasan empiri untuk memahami hubungan antara informasi, dimensi kekuasaan, serta upaya kontrol masyarakat dalam krisis global di Timor-Leste.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam wacana kebijakan publik, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis struktur dan fungsi wacana dalam poster kebijakan publik tanpa melakukan manipulasi terhadap data.

Objek penelitian dalam kajian ini adalah wacana yang terdapat dalam poster kebijakan publik terkait krisis energi yang diunggah oleh media berita resmi milik pemerintah Timor-Leste, *Tatoli*. Sumber data berupa teks dalam poster yang memuat tajuk, isi, serta elemen-elemen linguistik yang merepresentasikan kebijakan dan pesan kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan data berupa teks yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi struktur teks, analisis difokuskan pada struktur makro (topik), superstruktur (skema wacana), dan struktur mikro (pilihan leksikon, sintaksis, dan semantik). Pada dimensi kognisi sosial, analisis diarahkan untuk mengungkap bagaimana wacana membentuk cara berpikir, persepsi, dan pemahaman masyarakat terhadap situasi krisis. Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, analisis bertujuan untuk

melihat relasi antara wacana, kekuasaan, serta peran pemerintah dalam mengarahkan dan mengontrol respons masyarakat melalui bahasa.

Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu dengan memanfaatkan berbagai kerangka teoretis yang relevan, seperti kebijakan bahasa, ideologi bahasa, dan analisis wacana kritis, dalam proses interpretasi data. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kebahasaan dalam poster kebijakan publik.

Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana bahasa dalam poster kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mekanisme diskursif yang membangun legitimasi, membentuk kognisi sosial, serta mengarahkan perilaku masyarakat dalam menghadapi krisis global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis sebuah poster yang diunggah oleh agen bertia resmi milik pemerintah Timor-Leste, yakni *Tatoli*. Poster ini disebarluaskan pada tanggal 2 April 2026. Maryanti, dkk. (2024) menyatakan bahwa poster adalah media komunikasi yang memadukan unsur visual berupa gambar dengan teks, yang dirancang dan disebarluaskan secara sengaja untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Objek penelitian ini akan dianalisis secara kritis menggunakan AWK model Teun A. Van Dijk dengan melihat tiga lapis struktur utama, yaitu struktur makro, super struktur, dan struktur mikro. Ketiga struktur ini akan digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana teks atau pesan visual, seperti poster, menyampaikan ideologi, kekuasaan, dan realitas sosial kepada khalayak.

Tatoli
Agência Notícias de Timor-Leste

GOVERNUN PLANEIA OINSÁ HALO POUPANSA HODI GARANTE KOMBUSTIVEL BA TEMPUN NARUK

Dih, 02 Abril 2026 (TATOLI)

1 SITUASAUN ATUÁL (KRIZI ENERJIA MUNDIÁL)



► Funu iha Médiu Oriente
(Iraun destroi fasilidade
mina/gás)



► Estoke Mundiál Limitadu
(La'ós de'it presu)



► Logístika Atakata
(Ró tula mina menus Ázia)

2 MEDIDA URJENTE (REZERVA SEGURANSA EMERJENSIA)



INVESTIMENTU
MILLAUN
\$168.8



AKIZISAUN
MILLAUN \$80 LITRU
GASÓLEU (SOLAR)



GARANTE
AUTONOMIA
TO'O TINAN
ROHAN



AJUSTE DIRETU
URJENTE
(HOSI KONSELLU
MINISTRU)

3 PLANU POUPANSA SE SITUASAUN SAI KRÍTIKU

ELETRISIDADE	 23:00 - 05:00	MATE HUSI TUKU 23:00 KALAN TO'O 05:00 DADEER
TRANSPORTE		REDÚS MOVIMENTASAUN TRANSPORTE PÚBLIKU & PRIVADU
FIM-DE-SEMANA		SÁBADU NO DOMINGU KARRETA LA LA'O, PRIORIZA LA'O AIN
INSTITUISAUN		KONTROLE RIGOROSU BA UTILIZASAUN KARRETA ESTADU



“Ita tenke foti medida agora. Maske funu hotu semana oin, suplay mina sei laiha tanba fasilidade sira destroi ona. Ne'e Ne'e mak problema boot ba ita.”

Kay Rala Xanana Gusmão, Primeiru-Ministru

JORNALISTA : HORTENCIO SANCHEZ | EDITOR : CANCIO XIMENES | INFOGRAFISTA : OCTAVIO GUTERRES

Gambar 1. Poster “Governu Planeia Oinsa Halo Pounpasa Hodi Garante Kombustivel Ba Tempu Naruk”
 Sumber: media Tatoli (2026)

Analisis Struktur Makro

- a. Tema Dominan

Struktur makro dalam poster ini dibangun dari tema global yang berpusat pada narasi krisis energi yang mengalami kondisi darurat sehingga dianggap membutuhkan intervensi negara. Tema utama yang dapat ditarik adalah bahwa pemerintah sedang menghadapi tekanan eksternal berupa krisis sumber daya dan energi akibat dari konflik global, sehingga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin ketersediaan bahan bakar serta stabilitas nasional sebagai respons.

Makrostruktur ini tidak muncul secara netral, melainkan dibentuk melalui proses seleksi serta menonjolkan informasi tertentu. Poster tersebut secara konsisten menempatkan krisis sumber daya dan energi sebagai fenomena global – ditunjukkan melalui referensi terhadap konflik di Timur Tengah, keterbatasan stok dunia, serta gangguan distribusi logistik. Dengan demikian, sumber permasalahan direpresentasikan sebagai faktor eksternal di luar kendali pemerintah domestik. Strategi ini secara implisit berfungsi untuk mengalihkan potensi atribusi kesalahan dari pemerintah kepada apa yang terjadi secara global, sehingga membangun kerangka pemahaman bahwa kebijakan yang diambil merupakan respons rasional terhadap situasi yang tidak terhindarkan.

Dalam kerangka makro yang sama, pemerintah direpresentasikan sebagai aktor utama yang **proaktif, solutif, dan bertanggung jawab**. Hal ini terlihat dari penggunaan verba seperti *planeia* ‘merencanakan’, *garante* ‘menjamin’, serta penekanan pada *medida urgente* ‘langkah darurat’. Dengan demikian, struktur makro tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra pemerintah sebagai **pelindung dan pengelola krisis**. Representasi ini memperkuat legitimasi institusional dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan situasi.

Lebih jauh, makrostruktur poster ini juga mengandung dimensi ideologis yang berkaitan dengan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat. Narasi global yang dibangun mengarah pada logika sebab-akibat: krisis global → tindakan pemerintah → penyesuaian masyarakat. Dalam pola ini, masyarakat secara implisit ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan, seperti penghematan energi dan pembatasan mobilitas. Dengan demikian, tema besar yang tampak sebagai upaya perlindungan juga dapat dibaca sebagai bentuk **normalisasi kontrol sosial**,

di mana pembatasan terhadap masyarakat dipresentasikan sebagai konsekuensi logis dari situasi krisis.

Selain itu, dengan menggabungkan unsur krisis dan perlindungan dalam satu kerangka makro, poster ini berfungsi sebagai alat diskursif untuk **mengintegrasikan kepentingan negara dengan kepentingan publik**. Artinya, apa yang diposisikan sebagai “kepentingan rakyat” pada saat yang sama juga merepresentasikan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas energi, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif analisis wacana kritis, hal ini membuka kemungkinan bahwa makrostruktur tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga **strategis dalam mempertahankan legitimasi dan otoritas pemerintah di tengah situasi darurat**.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur makro poster ini tidak sekadar menyampaikan topik tentang krisis energi, melainkan mengonstruksi sebuah narasi besar yang menggabungkan unsur krisis global, respons negara, dan penyesuaian masyarakat, yang secara keseluruhan berfungsi untuk memperkuat posisi pemerintah sebagai aktor sentral dalam pengelolaan dan pengendalian situasi.

b. Konstruksi Identitas dan Subjektivitas

Dalam perspektif analisis wacana kritis, poster ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi identitas sosial para aktor yang terlibat, khususnya pemerintah dan masyarakat. Pemerintah direpresentasikan sebagai subjek yang aktif, rasional, dan berotoritas, yang ditunjukkan melalui penggunaan leksikon yang menekankan tindakan strategis seperti *planeia* ‘merencanakan’, *garante* ‘menjamin’, serta *medida urgente* ‘langkah darurat’. Pilihan bahasa ini membentuk identitas pemerintah sebagai agen yang memiliki kapasitas penuh dalam mengelola krisis, sekaligus sebagai pelindung yang bertanggung jawab atas stabilitas nasional. Dalam konstruksi ini, pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai figur yang legitim dan dipercaya untuk menentukan arah tindakan kolektif.

Sebaliknya, masyarakat dikonstruksi secara implisit sebagai subjek yang pasif dan reseptif terhadap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari absennya representasi suara masyarakat dalam wacana, serta dominasi bentuk-bentuk pernyataan yang bersifat

instruktif dan regulatif, seperti pembatasan penggunaan listrik, mobilitas, dan aktivitas publik. Masyarakat tidak diposisikan sebagai agen yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melainkan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang telah didefinisikan oleh pemerintah. Dengan demikian, subjektivitas masyarakat dibentuk sebagai “warga yang patuh”, yang diharapkan menerima kebijakan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menghadapi krisis.

Relasi antara kedua identitas ini menunjukkan adanya **asimetri kekuasaan**, di mana pemerintah menguasai produksi makna dan arah wacana, sementara masyarakat menjadi objek dari regulasi tersebut. Dalam konteks ini, konstruksi identitas tidak bersifat netral, melainkan mengandung dimensi ideologis yang berfungsi untuk menormalisasi relasi kuasa tersebut. Dengan membingkai kebijakan sebagai bentuk perlindungan, poster ini secara tidak langsung membentuk subjektivitas masyarakat agar menerima pembatasan sebagai sesuatu yang wajar dan perlu. Oleh karena itu, konstruksi identitas dalam poster ini berperan penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus mengarahkan cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan yang diterapkan.

Analisis Superstruktur

a. Judul dan Struktur Informasi

Superstruktur poster ini diorganisasikan melalui hierarki informasi yang jelas dan strategis, yang mengarahkan pembaca dari pemahaman situasi menuju penerimaan kebijakan secara bertahap. Judul utama yang berbunyi “*Governu planeia oinsá halo poupana hodi garante kombustivel...*” ditempatkan sebagai titik masuk utama dengan penekanan pada peran pemerintah sebagai aktor yang aktif dan solutif. Secara retorik, konstruksi ini tidak menggunakan bentuk imperatif langsung kepada masyarakat, melainkan menonjolkan tindakan pemerintah, sehingga menciptakan framing bahwa kebijakan yang disampaikan merupakan hasil perencanaan rasional, bukan sekadar instruksi sepihak.

Struktur skematik poster ini mengikuti pola komunikasi krisis yang sistematis, yaitu dimulai dari **identifikasi situasi**, dilanjutkan dengan **penyampaian respons pemerintah**, dan diakhiri dengan **implikasi kebijakan bagi masyarakat**. Bagian awal memuat

representasi krisis energi global sebagai latar yang mendasari keseluruhan wacana, yang berfungsi untuk membangun urgensi sekaligus legitimasi terhadap tindakan yang diambil. Selanjutnya, bagian inti menampilkan langkah-langkah konkret pemerintah seperti pengamanan cadangan energi dan investasi, yang memperkuat citra pemerintah sebagai aktor yang responsif dan bertanggung jawab. Pada tahap berikutnya, struktur wacana bergeser ke arah konsekuensi praktis berupa pembatasan dan pengaturan aktivitas masyarakat, yang diposisikan sebagai bentuk adaptasi kolektif terhadap kondisi krisis.

b. Organisasi Visual dan Pengaturan Spasial

Dari segi organisasi visual dan pengaturan spasial, poster ini menunjukkan strategi desain

informasi yang terstruktur dan komunikatif. Setiap bagian informasi dipisahkan secara jelas melalui blok-blok visual yang dilengkapi dengan ikon representatif, seperti simbol krisis, energi, dan aktivitas masyarakat, yang berfungsi sebagai penanda semantik sekaligus mempermudah pemahaman cepat. Penempatan elemen visual yang berurutan menciptakan alur baca yang linear dan terarah, sehingga pembaca secara tidak langsung mengikuti logika narasi yang dibangun oleh poster. Penggunaan warna yang kontras serta ruang visual (negative space) turut memperkuat keterbacaan sekaligus menegaskan perbedaan antara kondisi krisis dan respons yang ditawarkan.

Selain itu, penyajian informasi dalam bentuk poin-poin kebijakan mencerminkan strategi komunikasi yang efisien dan persuasif, karena memudahkan audiens dalam mengidentifikasi tindakan konkret yang harus dilakukan. Struktur ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga argumentatif, karena secara implisit membangun hubungan sebab-akibat antara krisis global dan kebutuhan akan pembatasan aktivitas. Dengan demikian, keseluruhan superstruktur poster ini berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengarahkan pemahaman dan sikap pembaca agar menerima kebijakan pemerintah sebagai respons yang logis, terukur, dan tidak terelakkan dalam menghadapi situasi krisis.

Analisis Struktur Mikro

Pada tataran struktur mikro, analisis mencakup elemen-elemen linguistik dan visual, seperti diksi, struktur kalimat, serta aspek semantik, sintaksis, gaya bahasa, dan retorika, yang dalam poster ini berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan makna.

a. Konstruksi Makna dan Ideologi

Struktur mikro dalam poster ini mengungkapkan kompleksitas semantik yang mencerminkan ideologi tata kelola krisis oleh negara. Pilihan leksikon seperti *krizi*, *emergensia*, *urjente*, dan *garante* tidak sekadar menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membangun konstruksi ideologis tentang situasi darurat yang memerlukan intervensi negara. Krisis direpresentasikan sebagai ancaman global yang tidak terhindarkan, sementara tindakan pemerintah diposisikan sebagai respons rasional dan legitim terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian, oposisi implisit yang terbentuk bukan lagi antara dua perilaku individu, melainkan antara kondisi “krisis” dan “stabilisasi” yang hanya dapat dicapai melalui kebijakan negara.

Secara semantik, pemilihan diksi dalam poster ini mengandung makna yang fungsional dan mudah dipahami, namun sekaligus sarat dengan arah ideologis. Ungkapan seperti *kontrolle rigorozu*, *reduz movimentasaun*, dan pembatasan aktivitas publik merepresentasikan bingkai kebijakan yang berorientasi pada pengendalian dan efisiensi energi. Dalam kerangka ini, masyarakat dikonstruksi sebagai bagian dari sistem yang harus diatur untuk mencapai stabilitas nasional. Bahasa yang digunakan bersifat langsung dan operasional, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami kebijakan sebagai tindakan teknis yang diperlukan, bukan sebagai pilihan yang dapat diperdebatkan.

Lebih lanjut, dimensi ideologis juga terlihat dalam integrasi konsep perlindungan dan kontrol dalam satu wacana. Istilah seperti *seguransa* dan *garante* menciptakan kesan bahwa kebijakan pembatasan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Namun, pada saat yang sama, istilah tersebut juga menegaskan legitimasi negara dalam mengatur perilaku warga. Dengan demikian, terjadi pergeseran makna di mana kontrol sosial direpresentasikan sebagai bentuk kepedulian negara.

Selain itu, aspek kolektivitas juga dibangun secara implisit melalui struktur wacana yang mengaitkan tindakan individu dengan kepentingan yang lebih luas. Pembatasan

aktivitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban personal, tetapi sebagai kontribusi terhadap stabilitas nasional dalam menghadapi krisis global. Hal ini mencerminkan ideologi yang menempatkan kepentingan negara dan kolektif di atas preferensi individu, sekaligus membentuk subjektivitas masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan patuh terhadap kebijakan.

Dengan demikian, konstruksi makna dalam struktur mikro poster ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga ideologis, karena membentuk cara pandang pembaca terhadap krisis, peran negara, dan posisi mereka sebagai bagian dari sistem sosial yang harus beradaptasi terhadap kebijakan yang ditetapkan.

b. Struktur Gramatikaln dan Implikasi Pragmatik

Dari segi sintaksis, kalimat yang digunakan dalam poster ini didominasi oleh bentuk deklaratif yang bersifat informatif, dengan struktur yang ringkas, langsung, dan operasional. Hal ini membuat informasi yang disampaikan mudah dipahami dan cepat diproses oleh pembaca. Berbeda dengan wacana imperatif langsung, konstruksi sintaksis dalam poster ini lebih menonjolkan tindakan pemerintah melalui pernyataan seperti *planeia*, *garante*, dan *implementa medida*, sehingga menciptakan kesan bahwa kebijakan yang disampaikan merupakan hasil perencanaan rasional, bukan sekadar instruksi sepihak kepada masyarakat.

Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan bentuk imperatif langsung, implikasi pragmatik dari struktur kalimat tetap mengarah pada fungsi regulatif. Hal ini terlihat pada penggunaan konstruksi seperti *reduz movimentasaun* dan pengaturan waktu aktivitas publik, yang secara implisit mengandung makna perintah atau pembatasan. Dengan demikian, hubungan antara komunikator (pemerintah) dan audiens (masyarakat) tetap menunjukkan relasi yang asimetris, di mana pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan tindakan, sementara masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri.

Struktur frasa dalam poster ini juga menunjukkan pola verbal yang konsisten, terutama melalui penggunaan verba aksi yang berkaitan dengan pengendalian dan pengaturan, seperti *kontrole*, *reduz*, dan *limita*. Pola ini menekankan adanya proses intervensi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan diskursus kesehatan yang menempatkan individu sebagai agen aktif perubahan, dalam poster ini

masyarakat lebih diposisikan sebagai bagian dari sistem yang diatur, sementara pemerintah berperan sebagai aktor utama yang mengendalikan situasi.

Secara pragmatik, konstruksi gramatikal ini mencerminkan strategi komunikasi yang berorientasi pada legitimasi kebijakan. Informasi disampaikan dalam bentuk yang tampak objektif dan teknis, sehingga pembaca diarahkan untuk menerima kebijakan sebagai sesuatu yang logis dan diperlukan dalam menghadapi krisis. Dengan demikian, struktur gramatikal tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai mekanisme diskursif yang membentuk kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

c. Implikatur dan Presuposisi

Dalam kerangka analisis wacana kritis, implikatur dan presuposisi dalam poster ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat linguistik, tetapi juga sebagai mekanisme ideologis yang membentuk cara pandang pembaca terhadap realitas. Presuposisi utama yang dibangun adalah bahwa krisis energi global merupakan kondisi objektif yang tidak dapat dihindari dan memiliki dampak langsung terhadap konteks nasional. Melalui penggunaan istilah seperti *krizi energia mundiál*, poster ini mengandaikan bahwa situasi darurat tersebut bersifat nyata, mendesak, dan memerlukan respons segera, tanpa membuka ruang bagi kemungkinan interpretasi alternatif. Presuposisi ini secara tidak langsung berfungsi untuk **menutup ruang kritik**, karena ketika suatu kondisi telah diterima sebagai fakta yang tidak terbantahkan, maka respons terhadapnya cenderung dianggap sebagai konsekuensi logis.

Implikatur dalam poster ini bekerja secara lebih subtil melalui konstruksi kalimat yang tampak informatif, tetapi secara pragmatik mengandung fungsi regulatif yang kuat. Pernyataan seperti *reduz movimentasaun transporte* atau pengaturan waktu aktivitas publik tidak secara eksplisit menggunakan bentuk perintah, namun secara implisit mengandung kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Strategi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat diartikulasikan melalui bahasa yang tampak netral dan teknokratis, sehingga kontrol terhadap perilaku sosial tidak hadir sebagai paksaan, melainkan sebagai kebutuhan rasional dalam situasi krisis.

Lebih jauh, hubungan antara presuposisi dan implikatur dalam wacana ini membentuk suatu logika diskursif yang memperkuat legitimasi kekuasaan. Dengan terlebih dahulu membangun asumsi bahwa krisis bersifat global dan tidak terelakkan, wacana kemudian mengimplikasikan bahwa pembatasan terhadap masyarakat adalah langkah yang wajar dan perlu. Dalam konteks ini, kebijakan tidak lagi diposisikan sebagai pilihan politik yang dapat dinegosiasikan, melainkan sebagai respons teknis yang seolah-olah bebas dari kepentingan. Hal ini mencerminkan kecenderungan dalam wacana institusional untuk **menyembunyikan dimensi kekuasaan di balik bahasa yang objektif dan rasional**.

Dengan demikian, implikatur dan presuposisi dalam poster ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan secara efisien, tetapi juga untuk membentuk kerangka berpikir yang mengarahkan pembaca pada penerimaan tanpa resistensi. Melalui strategi ini, wacana tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial di mana kontrol negara terhadap masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang alami, diperlukan, dan tidak terelakkan dalam menghadapi krisis.

KESIMPULAN

Analisis wacana kritis menggunakan teori Teun A. van Dijk terhadap poster kebijakan energi pemerintah Timor Leste menunjukkan bahwa poster tersebut secara efektif menyampaikan pesan publik melalui integrasi struktur makro, superstruktur, dan mikro. Pada tingkat makro, poster membangun narasi krisis energi global sebagai kondisi darurat yang menuntut intervensi negara. Pada tingkat superstruktur, penyusunan informasi dilakukan secara sistematis melalui pola situasi, respons pemerintah, implikasi kebijakan, dan legitimasi otoritas, sehingga membentuk alur argumentatif yang persuasif. Sementara itu, pada tingkat mikro, penggunaan diksi yang menekankan urgensi, kontrol, dan jaminan, serta strategi semantik seperti implikatur dan presuposisi, berperan dalam mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan sebagai respons yang rasional dan tidak terelakkan. Namun demikian, dalam konstruksi wacananya, ditemukan kecenderungan ideologis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara masyarakat direpresentasikan sebagai subjek yang harus menyesuaikan diri, sehingga mencerminkan relasi kuasa yang asimetris dan potensi normalisasi kontrol sosial dalam situasi krisis.

Pemerintah Timor Leste dalam merancang komunikasi publik di masa mendatang disarankan untuk lebih membuka ruang partisipasi dan representasi masyarakat secara lebih dialogis, sehingga tidak hanya menempatkan warga sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi serta pengakuan terhadap berbagai dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas komunikasi. Pendekatan komunikasi krisis juga tidak semestinya hanya menekankan aspek teknokratis dan kontrol, tetapi perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji respons masyarakat terhadap wacana kebijakan semacam ini, serta membandingkannya dengan media komunikasi lain, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan implikasi ideologis dari komunikasi publik dalam konteks krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi, Nugroho Sulistyono, dkk. (2025). Implikasi Konflik Iran-Israel bagi Kebijakan Pertahanan Indonesia (Sebuah Refleksi Historis dari Pembelajaran Perang Diponegoro untuk Ketahanan Nasional). *Bappenas: Working Papers*, VIII (3), 405-421.
- Debora., Sitorus, R. Y., Manullang, T. D., Situmorang, Y. Y., & Sari, Y. (2024). Analisis Poster Tentang Pentingnya Pendidikan di Media Massa: Kajian Semantik Leksikal dan Gramatikal. *BLAZE: Jurnal*
- Madani, Ahmad Zaki, & Subaidi Qomar. (2025). Pengaruh Konflik Timur Tengah dan Stabilitas Global dalam Perkembangan Negara-Negara Mayoritas Muslim. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2 (2), 236-244.
- Meutia, I. F. (2017). *Kebijakan publik: Teori, analisis, dan praktik*.
- Ratnaningsih, D. (2019). *Analisis Wacana Kritis: Sebuah Teori dan Implementasi*. Lampung: Penerbit Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Septiana, dkk. (2022). *Analisis wacana kritis iklan layanan masyarakat Covid-19 pada koran Media Indonesia* (Kajian Teun A. Van Dijk).

- Suharto, E. (2008). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Suriadi. (2025). *Wacana Ideologi Perlawanan dalam Tuntutan Rakyat di Media Sosial: Perspektif Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk*.
- Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (2016). *[Judul laporan tidak tersedia]*.
- Van Dijk, T. A. (1997). *Discourse as social interaction*. Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.
- Van Dijk, T. A. (2009). *Society and discourse: How social contexts influence text and talk*. Cambridge University Press.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Zahari, dkk. (2025). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Zulhandayani, dkk. (2023). Struktur wacana pada iklan pinjol oleh Kominfo: Teori Van Dijk.